

ANALISIS EFEKTIFITAS KINERJA KEUANGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MAKASSAR

Abdul Rauf *)

Abstract : *Financial performance is a picture of financial condition in a given period either in relation to aspects of fund raising and distributing funds that are usually measured by indicators of capital adequacy, liquidity, and profitability. Profitability assessment aspect to determine the ability to create profits, which are certainly important for the owners. With good financial performance will ultimately affect both the internal and for external parties.*

Keyword : *Effectiveness, Performance and Financial*

Latar Belakang

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan Negara dan daerah.

Akuntansi pemerintahan keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi analisis kinerja laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis kinerja yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Analisis kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan

penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Penilaian aspek Profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik. Dengan kinerja keuangan yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun bagi pihak ekstern.

Mengingat akan pentingnya analisis kinerja keuangan yang baik, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Makassar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah tulisan ini yaitu: Bagaimana Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Makassar ?.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan

baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2002) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio kemandirian, dan rasio efektifitas, sedangkan rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan keserasian tidak digunakan.

Rasio Keuangan

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169).

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Otonom

Abdul Halim (2007 : 234) memberikan definisi sebagai berikut: rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Rasio efektifitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128).

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya., yang dapat diformulasikan (Halim, 2004:128) sebagai berikut :

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Di dalam Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan Daerah yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil SDA dan Non SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

Trend Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Otonom

Kecenderungan kemandirian dan efektifitas keuangan daerah otonom penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Suatu daerah otonom kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian dan efektifitas keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian dan efektifitas keuangan yang ideal.

Amin (2000) menyatakan bahwa persentase trend digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar. Dari penjelasan ini maka trend kemandirian dan efektifitas keuangan dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD pada } t_0 + 1}{\text{KKD pada } t_0} \times 100 \%$$

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{EKD pada } t_0 + 1}{\text{EKD pada } t_0} \times 100 \%$$

Metode Analisis

Analisis Rasio

Analisis rasio yang diimplementasikan adalah rasio kemandirian dan efektifitas keuangan yang diusulkan Halim (2006). Kedua rasio tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan kota tiap-tiap tahun dengan memberikan gambaran ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pem. Pusat/ Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah

dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas maka kemampuan daerah pun semakin baik.

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Analisis Trend

Analisis trend digunakan untuk mengetahui, baik arah perkembangan kemandirian keuangan maupun efektifitas keuangan daerah. Persamaan untuk trend kemandirian keuangan daerah dan efektifitas keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Apabila persentase trend KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase trend KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian keuangan di Makassar semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan kemandirian keuangan di Makassar.
2. Apabila persentase trend EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD.

Semakin besar persentase trend EKD maka arah perkembangan efektifitas keuangan di Kota Makassar semakin baik. Sebaliknya bila persentase kurang dari 100%, maka terjadi penurunan efektifitas keuangan di Kota Makassar.

Efektifitas Keuangan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Makassar

Efektifitas keuangan daerah otonom merupakan kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan, yang diukur menggunakan rasio efektifitas keuangan daerah (Rasio EKD).

Perhitungan Rasio Efektifitas :

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah di atas, maka diperoleh hasil Rasio EKD seperti terlihat pada tabel 1 berikut ini

Tabel 1
Rasio Efektifitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kota Makassar
(dalam persen)

No.	Uraian Penerimaan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pendapatan Asli Daerah	100,92	105,34	108,49	106,49	95,53
2	Pajak Daerah	105,78	113,02	107,67	106,34	100,01
3	Restribusi Daerah	101,24	88,01	100,39	101,24	88,44
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	98,74	78,45	105,66	101,02	95,29
5	Lain-lain PAD yang sah	64,59	115,95	225,27	136,83	77,55
6	Pajak Hotel	109,43	99,54	100,39	110,67	100,03
7	Dana Perimbangan; bagi hasil pajak	92,04	103,07	100,59	91,63	107,51
8	Dana perimbangan; bukan hasil pajak	101,29	96,37	101,16	69,87	39,12

Sumber Data : Hasil Olahan

Pada tahun 2006 rasio terendah yaitu pada bagian “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” adalah 64,59% , dan pada tahun 2010 sekitar 77,55%. Sedangkan rasio efektivitas kemandirian daerah tertinggi yaitu pada tahun 2008 mencapai angka (225,27%) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan pada tahun 2009 sekitar 135,83%.

Tabel 2
Rasio Efektifitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah
Kota Makassar

No.	Uraian Penerimaan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pendapatan Asli Daerah	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Efektif
2	Pajak Daerah	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
3	Restribusi Daerah	Sangat efektif	Cukup efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Cukup efektif
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Efektif	Kurang efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Efektif
5	Lain-lain PAD yang sah	Kurang efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Kurang efektif
6	Pajak Hotel	Sangat efektif	Efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
7	Dana Perimbangan; bagi hasil pajak	Efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	efektif	Sangat efektif
8	Dana perimbangan; bagi hasil bukan pajak	Sangat efektif	efektif	Sangat efektif	Kurang efektif	Kurang efektif

Sumber Data : Hasil Olahan

Dari tahun 2006 sampai pada tahun 2010 hanya ada 1 bagian penerimaan yang berada pada kategori sangat efektif yakni penerimaan pajak daerah. Selanjutnya untuk bagian penerimaan lain hampir mendekati sangat efektif misalnya penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 berada pada kategori sangat efektif, kecuali tahun 2010 berada pada kategori efektif. Selanjutnya untuk penerimaan restribusi daerah 3 tahun berada pada

kategori sangat efektif yaitu pada tahun 2006, 2008, dan 2009. Terus untuk kategori cukup efektif yakni pada tahun 2007 dan 2010. Selanjutnya dari bagian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah yang berada pada kategori sangat efektif hanya 2 tahun yaitu 2008 dan 2009, yang berada pada kategori efektif di tahun 2006, dan 2010 serta yang berada pada kategori kurang efektif yaitu 2007. Untuk penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdapat 2

kategori yaitu kategori sangat efektif yaitu pada 2007, 2008, dan 2009. Sedangkan kategori kurang efektif berada tahun 2006 dan 2010. Untuk penerimaan pajak hotel juga berada pada kategori sangat efektif dan efektif; pada kategori sangat efektif yakni pada tahun 2006, 2008, 2009, dan 2010. Untuk kategori efektif yakni tahun 200

Trend Efektifitas Keuangan Daerah Otonom di Kota Makassar

Trend efektifitas keuangan daerah otonom menggambarkan kecenderungan

arah perkembangan efektifitas keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar.

Perhitungan Trend EKD :

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{EKD pada } t_0 + 1}{\text{EKD pada } t_0} \times 100\%$$

Untuk Rasio EKD daerah otonom di kota Makassar, Dari perhitungan rasio EKD seperti tampak pada tabel 14 berikut ini.

Tabel 3
Trend Efektifitas Keuangan Daerah Otonom di Kota Makassar
(dalam persen)

Tahun			
2007	2008	2009	2010
104,38	102,99	98,16	89,31
106,84	95,27	98,74	94,05
86,9	114,68	100,85	87,36
79,45	132,68	95,61	94,33
179,52	194,28	60,74	56,68
90,9	101,40	110,24	90,39
111,98	97,59	91,09	114,33
95,14	104,97	69,07	55,99

Sumber Data: Hasil Olahan

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

1. Ada beberapa tahun di kota Makassar yang telah terjadi perkembangan EKD dengan memiliki trend efektifitas keuangan statis di atas 100% dengan tahun dasar 2007 dan 2008, Untuk 2009 dan 2010 dikategorikan sedang.
2. Dan pada tahun 2009 memiliki trend efektifitas keuangan menurun dengan tahun 2010.

Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom di Kota Makassar

Trend kemandirian keuangan daerah otonom menggambarkan kecenderungan arah perkembangan kemandirian keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar.

Perhitungan Trend KKD :

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD pada } t_0 + 1}{\text{KKD pada } t_0} \times 100\%$$

Tabel 4
Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom di Kota Makassar
(dalam persen)

No.	Tahun	Rasio
1	2007	231,43
2	2008	64,56
3	2009	124,72
4	2010	73,19

Sumber : Data Hasil Olahan.

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

Dilihat dari trend kemandirian keuangan daerah otonom kota Makassar maka, diperoleh hasilnya yaitu:

1. Dimana pada tahun 2008 dan 2010 trend kemandirian keuangan daerah menurun.
2. Sedangkan di tahun 2007 dan 2009 memiliki trend kemandirian yang meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan efektifitas dan kemandirian keuangan daerah otonom Kota Makassar tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut.

1. Pada daerah Otonom Kota Makassar masih terdapat beberapa bagian Pendapatan asli daerah yang kurang efektif bila diukur dengan rasio efektifitas keuangan daerah (EKD) yang berkisar $> 39,12 - 77,55\%$
2. Daerah Otonom Kota Makassar dalam periode tersebut masuk dalam kategori kemandirian keuangan tinggi (rasio KKD 75% sampai dengan 100%). Dan masuk dalam kategori pola hubungan delegatif, yakni campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi Makassar sudah mampu dan mandiri itu dilihat dari segi rasio kemandirian keuangan daerah (KKD). Namun, kalau kita dari segi pelaksanaan kota Makassar masih pola partisipatif.
3. Pendapatan asli daerah pada tahun 2009, dibandingkan dengan pendapatan asli daerah tahun dasar 2006, trend efektifitas keuangan daerah otonom kota makassar meningkat,
4. Pada tahun 2009, dibandingkan dengan tahun dasar 2006, trend kemandirian keuangan daerah otonom kota makassar yang mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaddin, Fuad dan Mansoer, Faried Wijaya. 2001. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektoral Untuk Kalimantan Timur*, Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi. Vol. 1 No. 1.
- Astuti, Dwi, 2004, *Analisis Laporan Keuangan* ,: Bumi Aksara, Jakarta
- Bastian, Indra, 2003, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*.:Erlangga, Jakarta
- _____, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga, Jakarta
- Halim, Abdul .2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat
- Baswir, Revrison, 1999, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. BPFE : UMP AMP YPKN, Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Harahap, Sofyan S, 2004, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*,: Bumi Aksara, Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Indonesia*. IAI.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. : BPFE UGM, Yogyakarta
- Munawir, 2004, *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty, Jakarta
- Mudrajad Kuncoro.2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga, Jakarta

Nordiawan, Deddi, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta

Prastowo, Dwi, 2005, *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rineka Cipta, Jakarta

Prasetya, Gede, 2005, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Andi. Yogyakarta

Richard Holloway, 2003. *Menuju Kemandirian Keuangan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Saragih. 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

*) Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan pada STIE Nobel Indonesia Makassar